KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR JO. PERMENDAG NOMOR 3 TAHUN 2024 JO. PERMENDAG NOMOR 7 TAHUN 2024 JO. PERMENDAG NOMOR 8 TAHUN 2024



DIREKTORAT IMPOR
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Jakarta, 21 Juni 2024

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN



Pemerintah Mengatur Kebijakan di Bidang Impor Dengan Tujuan :

1. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat
2. Untuk melindungi Kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup
3. Untuk membangun, mempercepat dan melindungi industri tertentu di dalam negeri

DASAR KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Jo. 03 Tahun 2024 Jo. 07 Tahun 2024 Jo. 08 Tahun 2024

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang"

↓

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

1. PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Jo. PP No. 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas

↓

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku:

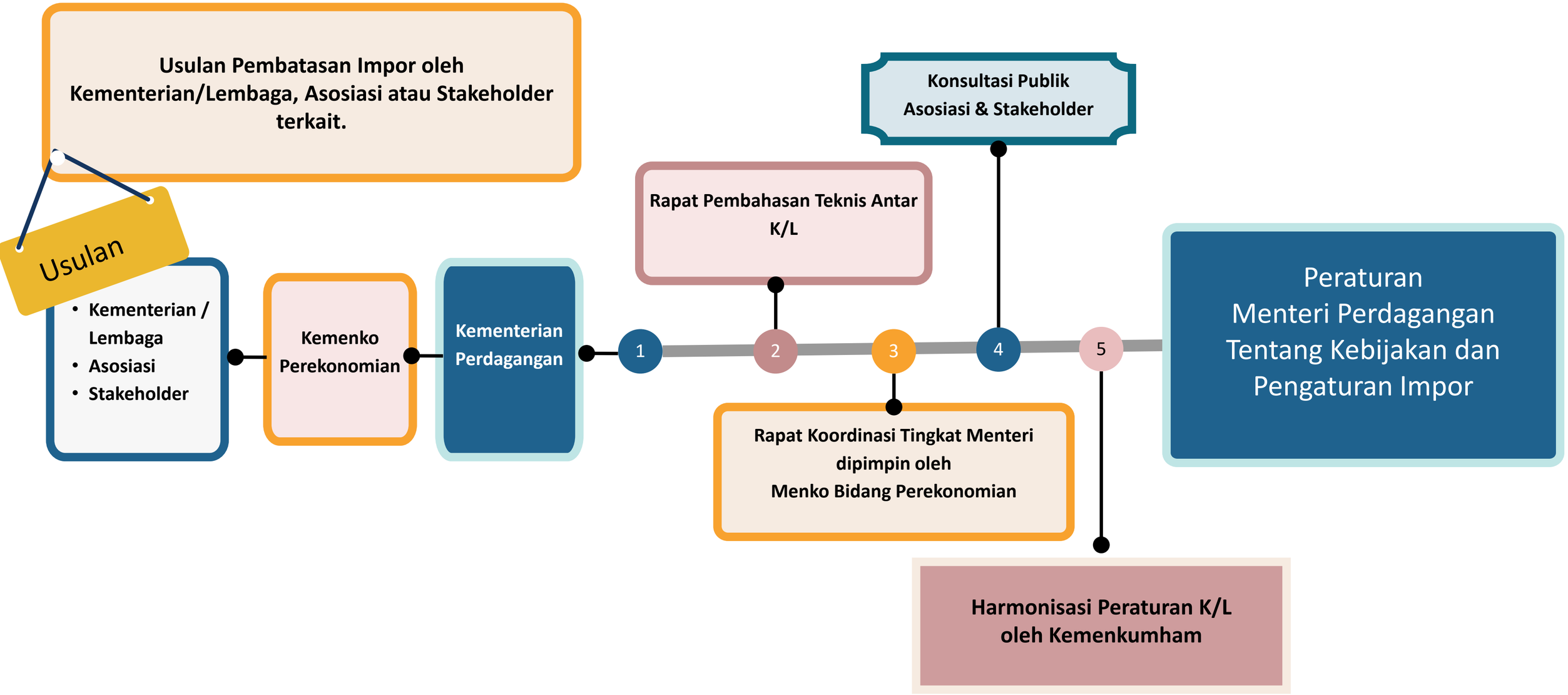
1. Untuk Barang Kiriman PMI berlaku mulai saat diundangkan (11 Desember 2023)
2. Untuk ketentuan lainnya berlaku mulai 10 Maret 2024

1. **Perubahan Pertama (Permendag 3 Tahun 2024)**
   Berlaku pada tanggal 10 Maret 2024
2. **Perubahan Kedua (Permendag 7 Tahun 2024)**
   Berlaku pada tanggal 6 Mei 2024
3. **Perubahan Ketiga (Permendag 8 Tahun 2024)**
   Berlaku pada tanggal 17 Mei 2024

PROSES PENYUSUNAN

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA



STRUKTUR PERMENDAG

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

BATANG TUBUH

LAMPIRAN I
- BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR

LAMPIRAN II
- BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

Dicabut!

LAMPIRAN III
- BARANG KIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

LAMPIRAN IV
- PENGECUALIAN IMPOR - IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

LAMPIRAN V
- PENGECUALIAN IMPOR - IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

LAMPIRAN VI
- PENGECUALIAN IMPOR - IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

LAMPIRAN VII
- IMPOR BARANG MANUFAKTUR SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER, BARANG MANUFAKTUR UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU BARANG MANUFAKTUR UNTUK PELAYANAN PURNA JUAL

LAMPIRAN VIII
- DAFTAR KOMODITAS YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (*POST BORDER*), YANG MASUK DALAM BARANG PANGAN STRATEGIS CAKUPAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

LAMPIRAN IX
- DIAGRAM ALIR PENERBITAN, PERUBAHAN, ATAU PERPANJANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IMPOR UNTUK KEGIATAN USAHA ATAU TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA



Impor

1 Impor Untuk Kegiatan Usaha

kegiatan usaha berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang terkait dengan:

1. transaksi Barang Impor yang dilakukan oleh Importir dengan tujuan pengalihan hak kepemilikan, pemakaian, atau penggunaan atas Barang untuk memperoleh imbalan atau kompensasi; atau
2. penggunaan Barang Impor yang dilakukan oleh Importir sebagai Barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi atau kegiatan usahanya.

1 Impor yang dilakukan oleh
a. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; atau
b. Importir pemiliki NIB yang berlaku sebagai API-P.

2 Terhadap kegiatan Impor atas Barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha (PB) di bidang Impor Barang tertentu dari Menteri sebelum Barang masuk ke dalam Daerah Pabean.

3 Terhadap Impor untuk Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis

2 Impor tidak Untuk Kegiatan Usaha

Tidak untuk kegiatan usaha berupa kegiatan selain dalam lingkup kegiatan usaha (Impor barang kiriman, barang contoh, barang bawaan penumpang dll)

Importir dapat dikecualikan dari:

1. NIB yang berlaku sebagai API;
2. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
3. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
4. ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IMPOR UNTUK KEGIATAN USAHA

1. Importir wajib memiliki **NIB yang berlaku sebagai API.**
2. Importir hanya dapat memilih NIB yang berlaku sebagai **API-U** atau NIB yang berlaku sebagai **API-P,** dengan ketentuan**:**
   a. NIB yang berlaku sebagai **API-U** hanya diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang tertentu **untuk tujuan diperdagangkan.**
   b. NIB yang berlaku sebagai **API-P** hanya diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang tertentu **untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.**
3. NIB yang berlaku sebagai API hanya dapat dilakukan perubahan terhadap NIB yang berlaku sebagai API-U menjadi NIB yang berlaku sebagai API-P.
4. Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam **keadaan baru**. Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. (Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru, Limbah Non B3, Baterai Lithium Tidak Baru).
6. Terhadap kegiatan Impor atas Barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor Barang tertentu dari Menteri sebelum Barang masuk ke dalam Daerah Pabean.
7. PB di bidang impor dalam bentuk Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP) dan Persetujuan Impor (PI).

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IMPOR UNTUK KEGIATAN USAHA

7. Permohonan PB diajukan secara elektronik melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
8. Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik, Importir harus memiliki hak akses yang dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW.
9. PB diterbitkan menggunakan Digital Signature dan mencantumkan QR Code serta diterbitkan melalui Sistem INSW.
10. PB diterbitkan berdasarkan Neraca Komoditas, dalam hal belum terdapat Neraca Komoditas diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang tersedia.
11. Terhadap Impor Barang Tertentu, dikenai kewajiban verifikasi/penelusuran teknis impor oleh Surveyor yang dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) di:
    a. negara asal Barang;
    b. negara muat; atau
    c. pelabuhan muat.
12. Dalam hal Barang tertentu diberlakukan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor pada saat pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari TPB, KPBPB, atau KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean, Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor untuk Barang tertentu dapat dilakukan di TPB, KPBPB, atau KEK.

LAMPIRAN I: BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

1

Kelompok Barang yang diatur impornya dalam Lampiran I, diurutkan dalam bentuk bab dengan **total 49 bab (Kelompok Barang)**

2

Pos Tarif dan Uraian Barang yang diatur impornya.
Dalam hal terdapat tanda ex., barang yang diatur impornya terbatas pada uraian detil barang yang tercantum dalam lampiran.

3

Kolom satuan barang yang wajib untuk barang terkait.

XXXII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	50.07	**Kain tenunan dari sutra atau sis sutra.**		**PI BARU** **PI TPT (API-P):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Laporan hasil verifikasi.	**KETENTUAN PENERBITAN PI** TPT dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. **KETENTUAN PENGECUALIAN PI dan LS** Pengecualian dari PI dan LS Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang dilakukan oleh Importir					
	5007.10	- Kain dari sutra noil:								
2608.	5007.10.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2609.	5007.10.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
	5007.20	- Kain lainnya, mengandung 85 % atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil :								
2610.	5007.20.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2611.	5007.20.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
	5007.90	- Kain lainnya:								
2612.	5007.90.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	

4

Kolom persyaratan memuat persyaratan yang dibutuhkan dalam permohonan PI baru, PI perubahan, atau PI perpanjangan

5

Kolom keterangan memuat ketentuan khusus yang berlaku untuk kelompok barang terkait.

6

Kolom IT, IP, PI, LS: Kolom yang tercentang adalah lartas yang berlaku untuk barang terkait.

Kolom Post Border: Tercentang artinya pengawasan post border.
Tidak tercentang artinya engawasan border

LAMPIRAN II: BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

1

Kelompok Barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru dalam Lampiran II, diurutkan dalam bentuk bab dengan **total 3 bab. (Kelompok Barang)**

2

Pos Tarif dan Uraian Barang yang diatur impornya.
Dalam hal terdapat tanda ex., barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru terbatas pada uraian detil barang yang tercantum dalam lampiran.

4

Kolom keterangan memuat ketentuan khusus yang berlaku untuk kelompok barang terkait.

I. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	T	IP	PI	LS	Post Border
A	**KELOMPOK A**								
1	**BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 5 TAHUN**								
	85.15	**Mesin dan aparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan aparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.**	**PI BARU** **PI BMTB A 5 Tahun (API-P):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku	**KETENTUAN PENERBITAN PI** BMTB A 5 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. **KETENTUAN PERSYARATAN PI** Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
		- Mesin dan aparatus pemateri atau penyolder:							
1.	8515.11.00	-- Besi dan pistol penyolder					√	√	√

3

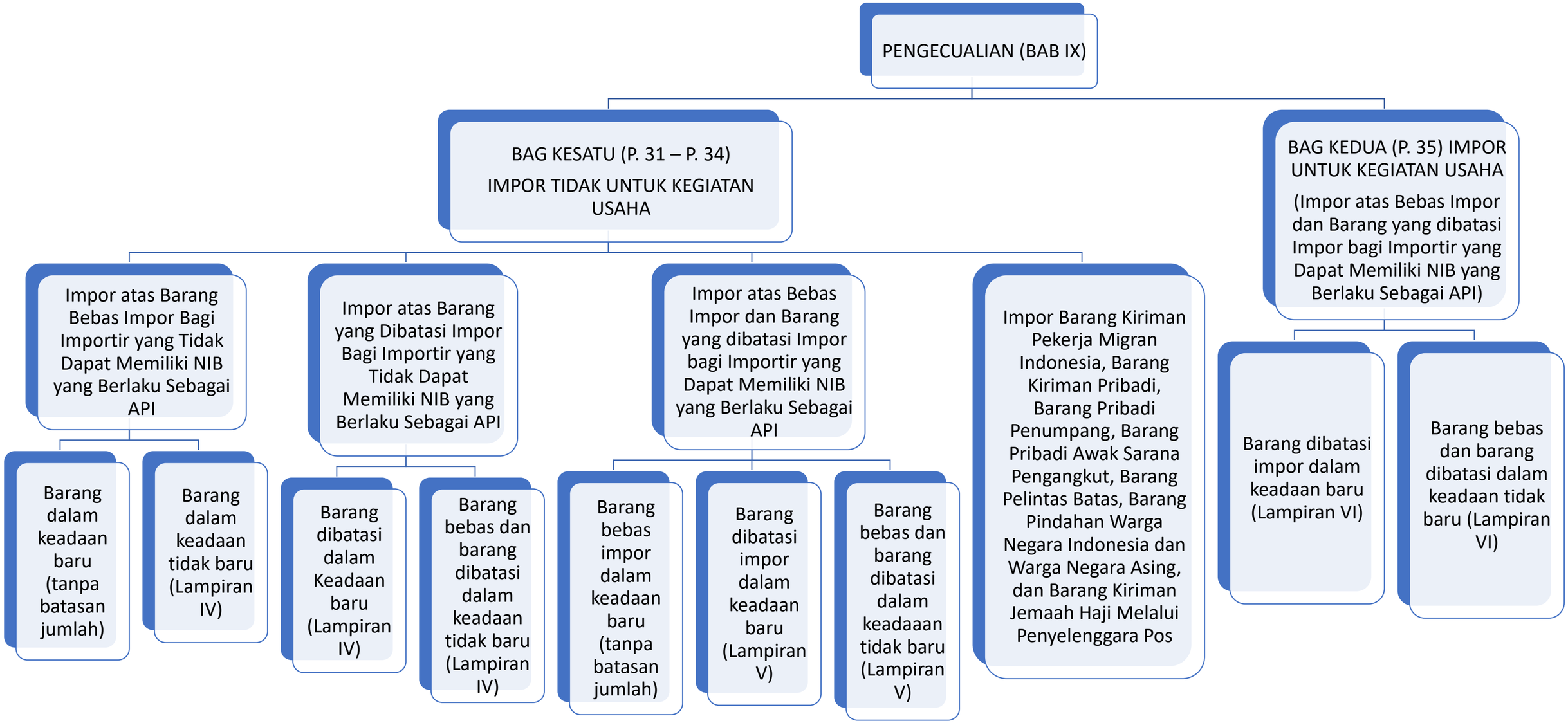
Kolom persyaratan memuat persyaratan yang dibutuhkan dalam permohonan PI baru, PI perubahan, atau PI perpanjangan

5

Kolom IT, IP, PI, LS: Kolom yang tercentang adalah lartas yang berlaku untuk barang terkait.

Kolom Post Border: Tidak tercentang: Pengawasan border
Tercentang: pengawasan border.

PENGECUALIAN KETENTUAN IMPOR



Pengecualian berlaku juga untuk impor barang dari LDP ke KPBPB

PENGECUALIAN ATAS IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API (PASAL 31 DAN 32)

BAB IX
PENGECUALIAN

Bagian Kesatu
Impor Tidak Dilakukan Untuk Kegiatan Usaha

Paragraf 1
Impor atas Barang Bebas Impor Bagi Importir yang Tidak Dapat Memiliki Nomor Induk Berusaha yang Berlaku Sebagai Angka Pengenal Importir

Pasal 31

(1) Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas Barang bebas Impor.
(2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pemenuhan NIB yang berlaku sebagai API.
(3) Impor atas Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan untuk kegiatan usaha.
(4) Impor atas Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. Barang promosi;
    b. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
    c. Barang kiriman;
    d. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
    e. Barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;
    f. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
    g. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud;
    h. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud;
    i. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud; dan
    j. Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional.
(5) Impor atas Barang bebas Impor dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam keadaan baru dilakukan tanpa surat keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(6) Impor atas Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan terhadap Barang dalam keadaan tidak baru.
(7) Terhadap Impor atas Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
(8) Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Impor atas Barang yang Dibatasi Impor Bagi Importir yang Tidak Dapat Memiliki Nomor Induk Berusaha yang Berlaku Sebagai Angka Pengenal Importir

Pasal 32

(1) Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas Barang yang dibatasi Impor.
(2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari:
    a. NIB yang berlaku sebagai API;
    b. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
    c. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
    d. ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.
(3) Impor atas Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan untuk kegiatan usaha.
(4) Impor atas Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap Barang dalam keadaan baru dan/atau Barang dalam keadaan tidak baru.
(5) Terhadap Impor atas Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
(6) Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

DIT IMPOR

LAMPIRAN IV: PENGECUALIAN ATAS IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API (PASAL 31 DAN 32)

BARANG DIBATASI IMPOR DALAM KEADAAN BARU

1. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
2. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
3. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud
4. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud
5. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud
6. Barang kiriman melalui penyelenggara pos
7. Barang untuk keperluan pameran
8. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan
9. Barang promosi
10. Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional
11. Barang untuk keperluan olahraga otomotif
12. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam
13. Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat

BARANG BEBAS IMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN BARANG DIBATASI IMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

1. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
2. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ Lembaga negara lainnya yang diimpor dalam rangka hibah
3. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud
4. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya.
5. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya.
6. Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional
7. Barang milik Duta Besar Republik Indonesia berupa kendaraan bermotor yang telah usai masa tugasnya paling banyak 1 (satu) unit

Detil lebih lanjut mengenai kelompok barang yang diberikan pengecualian untuk kategori tertentu, batasan nilai dan/atau jumlah, output pengecualian (tanpa surat keterangan atau dipersyaratkan surat keterangan), persyaratan dalam hal perlu surat keterangan, dan keterangan ketentuan lainnya, mengacu ke Lampiran IV

LAMPIRAN V: IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

BARANG DIBATASI IMPOR DALAM KEADAAN BARU	BARANG BEBAS IMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN/ATAU BARANG DIBATASI IMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU	BARANG BEBAS IMPOR DALAM KEADAAN BARU
1. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam 2. Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI 3. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk 4. Barang untuk keperluan pameran 5. Barang promosi 6. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan 7. Barang kiriman melalui penyelenggara pos. 8. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 9. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan dalam rangka pameran,display atau keperluan pra-produksi 10. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam 11. Barang contoh dalam rangka keperluan sertifikasi barang 12. Barang untuk keperluan olahraga otomotif	1. Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan 2. Barang berupa komponen/sub komponen dari kendaraan bermotor Completely Built Up (CBU) dan/atau Completely Knock Down (CKD) untuk keperluan analisa, pemeriksaan, pengujian dan/atau perbaikan di dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan termasuk kategori Mitra Utama (MITA) Kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO)	Barang bebas dalam keadaan baru dapat dilakukan Impor tidak untuk kegiatan usaha bagi Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

Detil lebih lanjut mengenai kelompok barang yang diberikan pengecualian untuk kategori tertentu, batasan nilai dan/atau jumlah, output pengecualian (tanpa surat keterangan atau dipersyaratkan surat keterangan), persyaratan dalam hal perlu surat keterangan, dan keterangan ketentuan lainnya, mengacu ke Lampiran V

LAMPIRAN VI: IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

BARANG DIBATASI IMPOR DALAM KEADAAN BARU

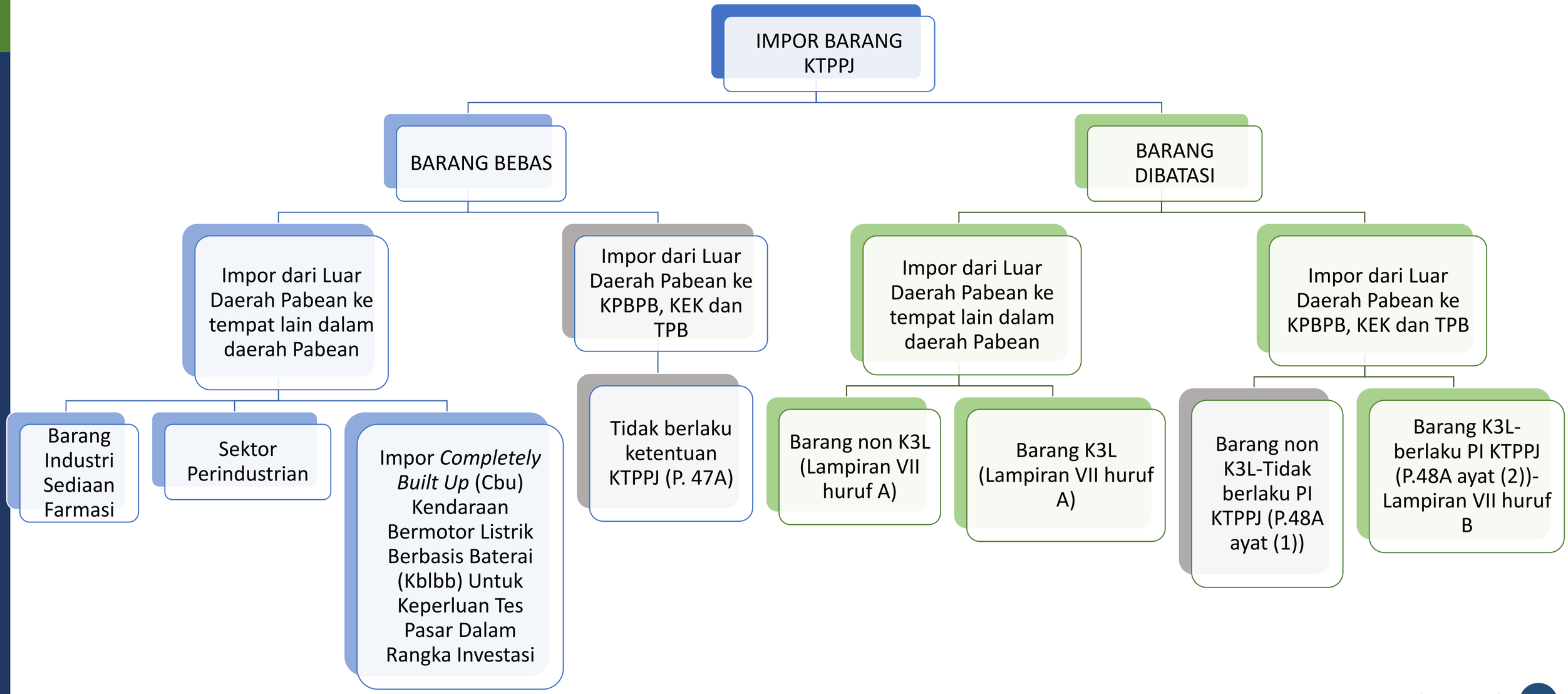
1. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud
2. Barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P (paling banyak 1 ton)
3. Barang yang diimpor oleh importir (API-P) di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, … dst.
4. Barang yang diimpor oleh Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kemenkeu tentang pengakuan sebagai Authorized Economic Operator (AEO) dan/atau ….
5. Barang yang diimpor oleh importir (API-P) sebagai industri pengguna (user) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) atau fasilitas sk…
6. Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)
7. Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, …..
8. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud
9. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud
10. Barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P yang digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan industrinya
11. Barang untuk keperluan olahraga kebutuhan induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga atau komite olahraga nasional dimaksud
12. Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku keperluan industri kilang bahan Bakar Minyak (BBM) dan Petrokimia.

BARANG BEBAS IMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU, BARANG DIBATASI IMPOR DALAM KEADAAN BARU, DAN/ATAU BARANG DIBATASI IMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

1. Barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas
2. Barang berupa Suku Cadang dan Perlengkapan Pesawat Udara untuk keperluan Badan Usaha Angkutan Udara atau Organisasi Perawatan Pesawat Udara, yang diimpor sendiri oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau Organisasi Perawatan Pesawat Udara.

Detil lebih lanjut mengenai kelompok barang yang diberikan pengecualian untuk kategori tertentu, batasan nilai dan/atau jumlah, output pengecualian (tanpa surat keterangan atau dipersyaratkan surat keterangan), persyaratan dalam hal perlu surat keterangan, dan keterangan ketentuan lainnya, mengacu ke Lampiran VI

LAMPIRAN VII: IMPOR BARANG MANUFAKTUR SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER, BARANG MANUFAKTUR UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU BARANG MANUFAKTUR UNTUK PELAYANAN PURNA JUAL



LAMPIRAN VII: IMPOR BARANG MANUFAKTUR SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER, BARANG MANUFAKTUR UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU BARANG MANUFAKTUR UNTUK PELAYANAN PURNA JUAL

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

BARANG DIBATASI IMPOR UNTUK IMPORTASI DARI LUAR DAERAH PABEAN KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (PERSETUJUAN IMPOR)	BARANG DIBATASI IMPOR YANG TERMASUK BARANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK IMPORTASI ATAU PEMASUKAN DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KPBPB, KEK, DAN/ATAU TPB (PERSETUJUAN IMPOR)	BARANG BEBAS IMPOR UNTUK INDUSTRI SEDIAAN FARMASI: Farmasi, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika (SURAT KETERANGAN)	BARANG BEBAS IMPOR UNTUK SEKTOR PERINDUSTRIAN (SURAT KETERANGAN)	BARANG BEBAS IMPOR BERUPA COMPLETELY BUILT UP (CBU) KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) (SURAT KETERANGAN)
1. Produk Hewan Olahan 2. Produk Kehutanan 3. Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya 4. Ban 5. Keramik 6. Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman 7. Makanan dan Minuman 8. Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 9. Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 10. Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya 11. Mainan 12. Tas 13. Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi 14. Alas Kaki 15. Elektronik 16. Bahan Peledak 17. Bahan Berbahaya 18. Bahan Kimia Tertentu 19. Katup	1. Bahan Peledak Untuk Industri Komersial 2. Bahan Berbahaya	1. Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang komplementer	1. Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang komplementer 2. Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang untuk keperluan tes pasar 3. Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang pelayanan purna jual	1. Importir pemilik API-P yang merupakan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang mengimpor CBU KBLBB sebagai barang untuk keperluan tes pasar dalam rangka investasi

Detil lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan dapat mengacu ke Lampiran VII

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERMENDAG 36 TAHUN 2023

1 **Arahan Presiden Untuk Pengetatan Impor Barang Konsumsi**

- Perubahan lartas impor semula hanya LS menjadi tetap LS atau PI dan LS untuk 6 (enam) kelompok produk tertentu.
- Pengaturan lartas baru untuk komoditi Tas dengan PI dan LS
- Perubahan pengawasan impor dari semula post border menjadi border untuk kelompok barang konsumsi.



2 **Arahan Presiden Relaksasi Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

- Pengaturan batasan kelompok barang, kondisi barang baru/tidak baru dan jumlah barang untuk 10 (sepuluh) kelompok barang yang dapat diimpor sebagai barang kiriman PMI baik yang tercatat maupun tidak tercatat di BP2MI.

3 **Usulan Perubahan (Penambahan/ Pengurangan/Pergeseran) Lartas Impor Barang dari K/L Pembina Sektor Terkait dan/atau Asosiasi Pelaku Usaha Terkait.**

- Usulan perubahan (Penambahan/ Pengurangan/Pergeseran) lartas impor barang dari K/L pembina sektor terkait untuk 9 (sembilan) kelompok barang.

4 **Penyesuaian Pengaturan Batang Tubuh Peraturan Menteri Perdagangan**

- Perubahan jenis NIB sebagai API
- Validasi lartas (IP/IT/PI) dengan PIB
- Pembatalan permohonan IP/IT/PI atau Surat Keterangan
- Perubahan LS
- Pengaturan Impor ke TPB, KPBPB dan KEK
- Pengecualian Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha dan Tidak Untuk Kegiatan Usaha
- PI dan Surat Keterangan Barang Komplementer, Tes Pasar atau Purna Jual

DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN IMPOR

NO	KOMODITAS	SEMULA				MENJADI			
		Komoditas	Lartas	Jumlah HS	Pengawasan	Lartas	Jumlah HS	Entitas Yang Dapat Mengimpor	Pengawasan
1	**Elektronik**	- Elektronik - Produk Tertentu Elektronik	- PI dan LS - LS	- 3 HS - 105 HS **108 HS**	Border Post Border	- PI & LS - LS	- 78 HS - 61 HS **139 HS**	- API U & API P - API U & API P	Border Border
2	**Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan**	- Produk Tertentu Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	- LS	- **37 HS**	Post Border	- PI & LS - LS	- 5 HS - 32 HS **37 HS**	- API U - API U & API P	Border Border
3	**Kosmetik dan Perbekalan Rumah Tangga**	- Produk Tertentu Kosmetik dan Perbekalan Rumah Tangga	- LS	- **38 HS**	Post Border	- PI & LS - LS	- 37 HS - 1 HS **38 HS**	- API U - API U & API P	Border Border
4	**Barang Tekstil sudah jadi lainnya**	- Produk Tertentu Barang Tekstil sudah jadi lainnya	- LS	- **87 HS**	Post Border	- PI & LS - PI & LS - LS	- 10 HS - 69 HS **79 HS** - 8 HS - 2 HS **10 HS** **Total 89 HS**	- API U & API P - API U - API U & API P - API U & API P	Border Border Border Post Border
5	**Mainan**	- Produk Tertentu Mainan Anak-Anak	- LS	- 21 HS	Post Border	- LS	- **21 HS**	- API U & API P	Border

DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN IMPOR

NO	KOMODITAS	SEMULA				MENJADI			
		Komoditas	Lartas	Jumlah HS	Pengawasan	Lartas	Jumlah HS	Entitas Yang Dapat Mengimpor	Pengawasan
6.	**Alas Kaki**	- Alas Kaki - Produk Tertentu Alas Kaki	- PI dan LS - LS	- 6 HS - 37 HS **43 HS**	Border Post Border	- PI & LS	- **43 HS**	- API U	Border
7.	**Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi**	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi	- PI & LS	- **328 HS**	Post Border	- PI & LS - LS	- 322 HS - 3 HS **325 HS**	- API U & API P - API U & API P API P hanya dapat mengimpor HS: 6117.80.90; 6212.10.99; 6212.90.19; 6212.90.99; 6217.10.90; 6203.31.00; 6203.41.00; & 6211.43.60	Border Post Border
8.	**Tas**	Bebas Impor	-	-	-	- PI & LS	- **23 HS**	- API U	Border
9.	**Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)**	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	- PI & LS - PI - LS	- 415 HS - 21 HS - 18 HS **454 HS**	Border Border Border	- PI & LS - PI - LS	- 446 HS - 17 HS - 52 HS **515 HS**	- API U & API P - API U & API P - API U & API P	Border Border Border
10.	**Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Batik dan Motif Batik**	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Batik dan Motif Batik	- PI & LS	- **76 HS**	Border	- PI & LS	- **79 HS**	- API U & API P	Border

DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN IMPOR

NO	KOMODITAS	SEMULA				MENJADI			
		Komoditas	Lartas	Jumlah HS	Pengawasan	Lartas	Jumlah HS	Entitas Yang Dapat Mengimpor	Pengawasan
11.	**Bahan Baku Plastik**	Bahan Baku Plastik	- PI	**- 3 HS**	Post Border	- PI & LS	**- 12 HS**	- API U & API P	Post Border
12.	**Bahan Berbahaya (B2)**	Bahan Berbahaya (B2)	- IT, IP, PI & LS	**- 94 HS**	Border	- IT, IP, PI & LS	**- 99 HS**	- API U BUMN & API P	Border
13.	**Hydrofluoro carbon (HFC)**	Hydrofluoro carbon (HFC)	-		**-**	- PI & LS	**- 20 HS**	- API U & API P	Border
14.	**Produk Kimia Tertentu**	Produk Kimia Tertentu	**-**	**-**	-	- PI & LS	**- 3 HS**	- API U & API P	Post Border
15.	**Katup**	Katup	-	-	-	- PI	**- 9 HS**	- API U & API P	Post Border
16.	**Plastik Hilir**	Bebas Impor	**-**		**-**	- **LS**	**- 140 HS**	- API-U & API-P	Post Border
17.	**Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya**	Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya	- PI dan LS	- 498 HS	Border	- PI dan LS	**- 518 HS**	- API-U & API-P	Border

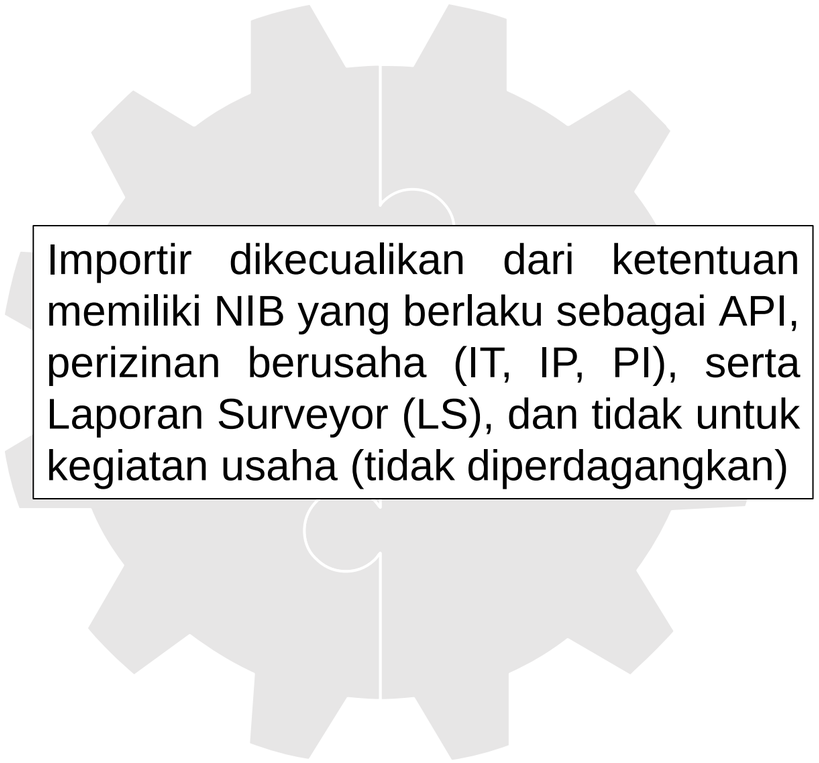
DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN IMPOR

NO	KOMODITAS	SEMULA				MENJADI			
		Komoditas	Lartas	Jumlah HS	Pengawasan	Lartas	Jumlah HS	Entitas Yang Dapat Mengimpor	Pengawasan
18.	**Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru**	Barang Modal Tidak Baru - Pemakai Langsung-Kelompok A Usia Paling Lama: - 5 Tahun - 10 Tahun - 15 Tahun				 - PI & LS - PI & LS - PI & LS	 - **1 HS** - **5 HS** - **1 HS**	 - API P - API P - API P	 Post Border Post Border Post Border
		Barang Modal Tidak Baru - Pemakai Langsung -Kelompok A Usia Paling Lama 20 Tahun	- PI & LS	- **280 HS**	Post Border	- PI & LS	- **257 HS**	- API P	Post Border
		Barang Modal Tidak Baru - Pemakai Langsung- Kelompok C Usia Paling Lama 15 Tahun, 20 Tahun dan 25 Tahun	- PI	- **32 HS**	Post Border	- PI	- **31 HS**	- API P	Post Border
		Barang Modal Tidak Baru - Remanufakturing –usia paling lama 20 Tahun	- PI & LS	- **20 HS**		- PI & LS	- **23 HS**	- API P	Post Border

POINT-POINT RELAKSASI/KEMUDAHAN IMPOR BARANG KIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DALAM PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2023

Impor Barang Kiriman PMI untuk Kelompok Barang Bebas Impor dapat Diimpor Dalam Keadaan Tidak Baru dengan Batasan Jumlah Tertentu

Impor Barang Kiriman PMI untuk Kelompok Barang Dibatasi Impor Dikecualikan Dari Ketentuan Pembatasan Impor, dapat diimpor Dalam Keadaan Baru maupun Tidak Baru dengan Batasan Jumlah Tertentu



Importir dikecualikan dari ketentuan memiliki NIB yang berlaku sebagai API, perizinan berusaha (IT, IP, PI), serta Laporan Surveyor (LS), dan tidak untuk kegiatan usaha (tidak diperdagangkan)

Impor Barang Kiriman PMI **Tanpa Memerlukan Perizinan Impor Dari Kementerian Perdagangan**

Impor Barang Kiriman PMI terdaftar sebanyak 3 (tiga) kali/ tahun takwim

Impor Barang Kiriman PMI tidak terdaftar sebanyak 1 (satu) kali/ tahun takwim

ATURAN BATASAN KELOMPOK, KONDISI DAN JUMLAH BARANG KIRIMAN PMI YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK DIIMPOR (LAMPIRAN III PERMENDAG 36/2023)

IMPOR BARANG KIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

No.	Kelompok Barang	Batasan Jumlah dan Satuan Setiap Pengiriman Barang			Output Pengecualian	Persyaratan Impor	Keterangan
		Jumlah		Satuan			
		Baru	Tidak Baru				
1.	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi	5	15	PCE	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Impor barang kiriman oleh PMI yang tercatat pada lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan pelindungan PMI dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun takwim. 2. Impor barang kiriman oleh PMI selain yang tercatat pada lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana
2.	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya	5 (baru/tidak baru)		PCE/Set			
3.	Barang Elektronik, tidak termasuk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*handheld*) dan Komputer Tablet	2 (baru/tidak baru)		NIU			
4.	Alas Kaki	2 (baru/tidak baru)		NPR			
5.	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	5 (baru/tidak baru)		PCE			
6.	Mainan Anak	4 (baru/tidak baru)		PCE/Set			

ATURAN BATASAN KELOMPOK, KONDISI DAN JUMLAH BARANG KIRIMAN PMI YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK DIIMPOR (LAMPIRAN IV PERMENDAG 36/2023)

No.	Kelompok Barang	Batasan Jumlah dan Satuan Setiap Pengiriman Barang			Output Pengecualian	Persyaratan Impor	Keterangan
		Jumlah		Satuan			
		Baru	Tidak Baru				
7.	Tas	2	2	PCE			kebijakan dalam pelayanan pelindungan PMI dengan ketentuan memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun takwim
8.	Makanan dan Minuman, tidak termasuk Minuman Mengandung Etil Alkohol	10	-	Pack/ Bungkus/ Kemasan			
9.	Perlengkapan Rumah Tangga	5	5	PCE/Set			
10.	Perlengkapan Sekolah	10 (baru/tidak baru)		Pack/ Bungkus/ Kemasan/ PCE Untuk tas sekolah dalam satuan PCE			

POKOK-POKOK PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

PENCABUTAN 11 (SEBELAS) POS TARIF/HS CODE KOMODITI BAHAN BAKU PLASTIK

No.	Komoditi	Pos Tarif	Uraian Barang	Keterangan
1.	Bahan Baku Plastik	3901.10.92	- - - Polietilena mengandung monomer alfa-olefin 5 % atau kurang	Sesuai hasil Rakortas tingkat Menteri tanggal 28 Februari 2024
2.	Bahan Baku Plastik	3901.20.00	- Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih	Sesuai hasil Rakortas tingkat Menteri tanggal 28 Februari 2024
3.	Bahan Baku Plastik	3902.10.40	- - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu	Sesuai hasil Rakortas tingkat Menteri tanggal 28 Februari 2024
4.	Bahan Baku Plastik	3903.11.10	- - - Dalam bentuk butiran	Sesuai hasil Rakortas tingkat Menteri tanggal 28 Februari 2024
5.	Bahan Baku Plastik	3903.19.20	- - - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu	Sesuai hasil Rakortas tingkat Menteri tanggal 28 Februari 2024
6.	Bahan Baku Plastik	3903.19.90	- - - Lain-lain	Sesuai hasil Rakortas tingkat Menteri tanggal 28 Februari 2024
7.	Bahan Baku Plastik	3903.90.91	- - - Polimer tahan impak dari stirena, memiliki notched izod impact kurang dari 80 J/m pada 23 °C	Sesuai hasil Rakortas tingkat Menteri tanggal 28 Februari 2024
8.	Bahan Baku Plastik	3903.90.99	- - - Lain-lain	Sesuai hasil Rakortas tingkat Menteri tanggal 28 Februari 2024
9.	Bahan Baku Plastik	3907.61.00	- - Mempunyai nilai kekentalan 78 ml/g atau lebih	Sesuai hasil Rakortas tingkat Menteri tanggal 28 Februari 2024
10.	Bahan Baku Plastik	3907.69.10	- - - butiran dan dalam bentuk semacamnya	Sesuai hasil Rakortas tingkat Menteri tanggal 28 Februari 2024
11.	Bahan Baku Plastik	3907.69.90	- - - Lain-lain	Sesuai hasil Rakortas tingkat Menteri tanggal 28 Februari 2024

PENCABUTAN 1 (SATU) POS TARIF/HS CODE KOMODITI PRODUK HASIL PERIKANAN

No.	Komoditi	Pos Tarif	Uraian Barang	Keterangan
1.	Produk Perikanan	ex 1302.39.90	--- Lain-lain Alginate dan turunannya	Sesuai dengan Pemendag 25/2022 Pasal II huruf i dan j bahwa Pos tarif/HS ex 1302.39.90 hanya berlaku sampai 31 Desember 2022 dan digantikan dengan Pos tarif/HS 3913.10.00 yang sudah tercantum pada Lampiran 1 Permendag 36 Tahun 2023

PENAMBAHAN 1 (SATU) POS TARIF/HS CODE KOMODITI BAHAN BERBAHAYA

No.	Komoditi	Pos Tarif	Uraian Barang	Keterangan
1.	Bahan Berbahaya	ex. 2939.80.00	-- Lain-lain (saxitoxin CAS Number 35523-89-8)	Pos Tarif/HS ex. 2939.80.00 dengan uraian barang: saxitoxin CAS Number 35523-89-8). Uraian barang tersebut sebelumnya ada di Pos Tarif/HS ex 3002.49.00 Usulan dari Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bea dan Cukai

PENCABUTAN 2 (DUA) POS TARIF/HS CODE KOMODITI BAHAN BERBAHAYA

No.	Komoditi	Pos Tarif	Uraian Barang	Keterangan
1.	Bahan Berbahaya	2905.31.00	-- Etilena glikol (etanadiol) Monoetilena Glikol (MEG)	Sesuai hasil Rakortas tingkat Menteri tanggal 28 Februari 2024
2.	Bahan Berbahaya	ex. 2927.00.90	- Lain-lain	Pos Tarif/HS ex 2927.00.90 dihapus karena barang yang diatur dipindahkan ke Pos Tarif/HS ex. 3204.12.10 Klasifikasi barang yang dipindah: Kuning Metanil (CI No. 13065) pada HS ex 2927.00.90 Usulan dari Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bea dan Cukai

PERUBAHAN CAKUPAN BARANG 2 (DUA) POS TARIF/HS CODE KOMODITI BAHAN BERBAHAYA

No.	Komoditi	Pos Tarif	Uraian Barang	Keterangan
1.	Bahan Berbahaya	ex. 3204.12.10	--- Bahan celup asam	Penambahan uraian barang pada Pos Tarif/HS 3204.12.10: Uraian Barang yang ditambahkan: Kuning Metanil (CI No. 13065) (pindahan dari Pos Tarif/HS ex. 2927.00.90) Usulan dari Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bea dan Cukai
2.	Bahan Berbahaya	ex. 3002.49.00	- - Lain-lain (ricin CAS number: 9009-86-3)	Sebelumnya 2 barang (saxitoxin dan ricin), saat ini hanya 1 barang yaitu ricin, sedangkan saxitoxin dimasukka ke dalam Pos Tarif/HS ex. 2939.80.00 yang akan ditambahkan dalam revisi Permendag. Usulan dari Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bea dan Cukai

POKOK-POKOK PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

1

OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Fortificant premixes (pos tarif 2106.90.73) merupakan salah satu bahan baku untuk industri tepung terigu. Kebijakan pengaturan impornya dirubah menjadi hanya **Laporan Surveyor** dengan pengawasan **post border**, dan dapat diimpor oleh perusahaan pemilik **NIB API-U maupun NIB API-P.**

2

KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Preparat rias bibir (pos tarif 3304.10.00), Preparat Rias Mata (pos tarif 3304.20.00), Bubuk, dipadatkan Maupun Tidak (pos tarif 3304.91.00), yang digunakan sebagai bahan baku untuk industri kosmetik, dapat diimpor oleh perusahaan pemilik **NIB API-U maupun NIB API-P** dengan kebijakan pengaturan impor berupa Persetujuan Impor dengan persyaratan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian, dan Laporan Surveyor.

PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

3

BAHAN BAKU PELUMAS

Permohonan Persetujuan Impor Bahan Baku Pelumas mempersyaratkan:

1. Surat pernyataan yang memuat informasi terkait kapasitas produksi; dan
2. dokumen perizinan berusaha untuk kegiatan industry.

4

PRODUK HORTIKULTURA

Permohonan Persetujuan Impor Produk Hortikultura mempersyaratkan salah satunya:
Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:

1. Sertifikat Good Agricultural Practices (GAP) dan Statement Letter;
2. Rencana Distribusi untuk API-U; atau
3. Rencana Produksi untuk API-P.

PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

5

Permohonan Persetujuan Impor BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan mempersyaratkan salah satunya:

Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

6

KEMUDAHAN IMPORTASI BARANG CONTOH, PENELITIAN, DAN/ATAU PENGEMBANGAN PRODUK YANG TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN

Impor barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk oleh API-P yang tidak untuk diperdagangkan, dikecualikan dari pengaturan dan kebijakan Impor dengan mekanisme Surat Keterangan Dirjen Daglu tanpa rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.

KOMODITI

Tekstil dan Produk Tekstil, Alas Kaki, Tas, Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi, Elektronik, Bahan Baku Pelumas, Mainan, Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya.

(Detail dalam Lampiran V Permendag)

7

PERUBAHAN SATUAN WAJIB

Satuan wajib untuk komoditi **Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, serta Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**, menjadi: **KGM, LTR, dan/atau PCE**

IMPOR BARANG KIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

1

JENIS BARANG

Tidak ada pembatasan jenis barang, kecuali **barang dilarang impor dan barang berbahaya** (intan kasar, precursor non farmasi, nitrocellulose (NC), bahan peledak, bahan perusak lapisan ozon (BPO), barang berbasis sistem pendingin, bahan berbahaya, hydrofluorocarbon (HFC), baterai lithium tidak baru, dan limbah non B3)

2

JUMLAH BARANG

Tidak ada pembatasan jumlah barang, dalam setiap pengiriman

3

KONDISI BARANG

Barang dapat diimpor dalam **keadaan baru maupun tidak baru**

4

TANGGAL BERLAKU

Berlaku **Surut** sejak 11 Desember 2023



PENGATURAN

Impor barang kiriman PMI mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia

IMPOR BARANG BAWAAN PRIBADI PENUMPANG

1

JENIS BARANG

Tidak ada pembatasan jenis barang, kecuali **barang dilarang impor dan barang berbahaya** (intan kasar, precursor non farmasi, nitrocellulose (NC), bahan peledak, bahan perusak lapisan ozon (BPO), barang berbasis sistem pendingin, bahan berbahaya, hydrofluorocarbon (HFC), baterai lithium tidak baru, dan limbah non B3)

2

JUMLAH BARANG

Tidak ada pembatasan jumlah barang, dalam setiap penumpang

3

KONDISI BARANG

Barang dapat diimpor dalam **keadaan baru maupun tidak baru**



PENGATURAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut

PEMBERLAKUAN

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 tahun 2024 mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan (29 April 2024).

6 Mei 2024



POKOK-POKOK PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

1. RELAKSASI LARTAS IMPOR

PERMENDAG 8/2024

RELAKSASI PENGATURAN IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024

1 ELEKTRONIK

Keterangan	Permendag 36/2023	Permendag 8/2024
Instrumen Pengaturan Impor	▪ Persetujuan Impor (PI) **berdasarkan pertimbangan teknis** dari Kementerian Perindustrian ▪ Laporan Surveyor (LS)	Laporan Surveyor (LS), kecuali 3 HS Code dengan : ▪ Persetujuan Impor (PI) **tanpa pertimbangan teknis** dari Kementerian Perindustrian ▪ Laporan Surveyor (LS)

2 OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Keterangan	Permendag 36/2023	Permendag 8/2024
Instrumen Pengaturan Impor	▪ Persetujuan Impor (PI) **berdasarkan pertimbangan teknis** dari Kementerian Perindustrian ▪ Laporan Surveyor (LS)	Laporan Surveyor (LS)

3 KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Keterangan	Permendag 36/2023	Permendag 8/2024
Instrumen Pengaturan Impor	▪ Persetujuan Impor (PI) **berdasarkan pertimbangan teknis** dari Kementerian Perindustrian ▪ Laporan Surveyor (LS)	Laporan Surveyor (LS)

RELAKSASI PENGATURAN IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024

4 ALAS KAKI

Keterangan	Permendag 36/2023	Permendag 8/2024
Instrumen Pengaturan Impor	▪ Persetujuan Impor (PI) **berdasarkan pertimbangan teknis** dari Kementerian Perindustrian ▪ Laporan Surveyor (LS)	Laporan Surveyor (LS), kecuali 6 HS Code dengan: ▪ Persetujuan Impor (PI) **tanpa pertimbangan teknis** dari Kementerian Perindustrian ▪ Laporan Surveyor (LS)

5 PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

Keterangan	Permendag 36/2023	Permendag 8/2024
Instrumen Pengaturan Impor	▪ Persetujuan Impor (PI) **berdasarkan pertimbangan teknis** dari Kementerian Perindustrian ▪ Laporan Surveyor (LS)	▪ Persetujuan Impor (PI) **tanpa pertimbangan teknis** dari Kementerian Perindustrian ▪ Laporan Surveyor (LS)

6 TAS

Keterangan	Permendag 36/2023	Permendag 8/2024
Instrumen Pengaturan Impor	▪ Persetujuan Impor (PI) **berdasarkan pertimbangan teknis** dari Kementerian Perindustrian ▪ Laporan Surveyor (LS)	Laporan Surveyor (LS)

RELAKSASI PENGATURAN IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024

7 KATUP

Keterangan	Permendag 36/2023	Permendag 8/2024
Instrumen Pengaturan Impor	Persetujuan Impor (PI) **berdasarkan pertimbangan teknis** dari Kementerian Perindustrian	Laporan Surveyor (LS)

8 BAHAN BAKU PELUMAS

Keterangan	Permendag 36/2023	Permendag 8/2024
Instrumen Pengaturan Impor	Persetujuan Impor (PI) **berdasarkan pertimbangan teknis** dari Kementerian Perindustrian	Laporan Surveyor (LS)

Dalam hal pelaku usaha telah memiliki Persetujuan Impor (PI) Bahan Baku Pelumas dan/atau Persetujuan Impor (PI) Katup yang masih berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlaku PI berakhir, dan importasi barangnya tidak dikenai kewajiban Laporan Surveyor (LS).

RELAKSASI PENGATURAN IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024

8 TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas, lain-lain (pos tarif 5311.00.90) dapat diimpor oleh perusahaan pemilik **NIB API-U maupun NIB API-P dengan** pengaturan impornya yang semula PI dan LS menjadi hanya LS.

Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas, kain goni dari abaca (pos tarif 5311.00.20) dengan pengaturan impornya yang semula PI dan LS menjadi **menjadi barang bebas impor** (tidak diatur kebijakan dan pengaturan impornya).

9 BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian, lain-lain (pos tarif 6307.90.90) yang semula hanya dapat diimpor oleh Perusahaan pemilik NIB API-U menjadi dapat diimpor oleh perusahaan pemilik **NIB API-U maupun NIB API-P,** dengan pengaturan impornya tetap Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor.

10 BAHAN KIMIA TERTENTU

Lisin dan esternya; garamnya (pos tarif ex. 2922.41.00) merupakan bahan baku atau bahan penolong di industri pakan sebagai sumber protein, dapat diimpor oleh perusahaan pemilik **NIB API-U maupun NIB API-P dengan** pengaturan impornya yang semula PI dan LS menjadi hanya LS.

RELAKSASI PENGATURAN IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024

11 KEMUDAHAN IMPORTASI BARANG CONTOH, PENELITIAN, DAN/ATAU PENGEMBANGAN PRODUK YANG TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN

Impor barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk oleh API-P yang tidak untuk diperdagangkan, dikecualikan dari pengaturan dan kebijakan Impor dengan mekanisme Surat Keterangan Dirjen Daglu tanpa rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait, namun dengan batasan jumlah tertentu.

KOMODITI

Kaca lembaran dan kaca pengaman, Sakarin, Siklamat Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol, Makanan dan Minuman, Tekstil dan Produk Tekstil, Alas Kaki, Tas, Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi, Elektronik, Bahan Baku Pelumas, Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya, Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Keramik, Semen Clinker dan Semen, Bahan Baku Plastik, Besi atau Baja Baja Paduan dan Produk Turunannya.
(Detail dalam Lampiran V Permendag)

RELAKSASI PENGATURAN IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024

12

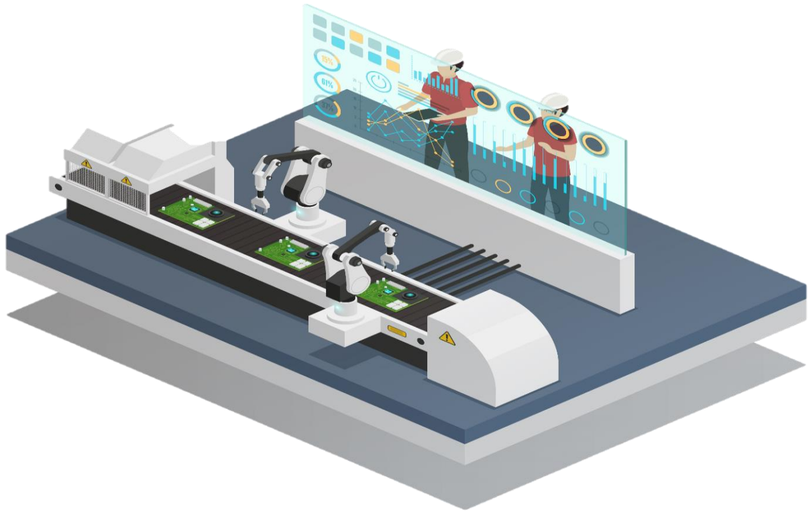
IMPOR BARANG MANUFAKTUR SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER, BARANG MANUFAKTUR UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU BARANG MANUFAKTUR UNTUK PELAYANAN PURNA JUAL OLEH IMPORTIR YANG MEMILIKI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) YANG BERLAKU SEBAGAI ANGKA PENGENAL IMPORTIR – PRODUSEN (API-P)

Sebanyak **18 komoditas** yang dapat diimpor sebagai barang komplementer, keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual, **kebijakan dan pengaturan impornya tetap sebagaimana diatur dalam Lampiran VII**, namun persyaratan pengajuan Persetujuan Impor **tanpa memerlukan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian.**

(Produk hewan olahan, produk kehutanan, besi atau baja baja Paduan dan produk turunannya, ban, keramik, kaca lembaran dan kaca pengaman, makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen Kesehatan, kosmetik dan perbekalan Kesehatan rumah tangga, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan, tas, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, alas kaki, elektronik, bahan berbahaya, bahan kimia tertentu, katup.)

RELAKSASI PENGATURAN IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024

13 Dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai *AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (*AEO) dan/atau penetapan sebagai MITRA UTAMA KEPABEANAN (MITA), diberikan pengecualian pengaturan impor sebagai berikut:



No.	Komoditas	Lartas	Pengecualian
1.	Besi, Baja, dan Produk Turunannya	PI dan LS	LS Bagi API-P (AEO/MITA)
2.	Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman	LS	LS Bagi API-P (AEO/MITA)
3.	Tekstil dan Produk Tekstil	PI dan LS	PI dan LS Bagi API-P (AEO/MITA)
4.	Bahan Baku Plastik	PI dan LS	PI dan LS Bagi API-P (AEO/MITA)
5.	Plastik Hilir	LS	LS Bagi API-P (AEO/MITA)
6.	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	LS	LS Bagi API-P (AEO/MITA)
7.	Kosmetik dan Perbekalan Rumah Tangga	LS	LS Bagi API-P (AEO/MITA)
8.	Katup	LS	LS Bagi API-P (AEO/MITA)

2. PENGATURAN PENGELUARAN BARANG IMPOR YANG TELAH TIBA DI PELABUHAN TUJUAN PERIODE 10 MARET – 17 MEI 2024

PERMENDAG 8/2024

PENGATURAN PENGELUARAN BARANG IMPOR YANG TELAH TIBA DI PELABUHAN TUJUAN PERIODE 10 MARET – 17 MEI 2024

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
   a. Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang telah tiba di pelabuhan tujuan sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat dilakukan importasi setelah memenuhi ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dalam Peraturan Menteri ini.
   b. Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dapat dilakukan di Kawasan Pabean di pelabuhan tujuan atau Kawasan Pabean lainnya.
   c. Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya, serta tekstil dan produk tekstil dikecualikan dari ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dalam Peraturan Menteri ini.
   d. Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dilakukan importasi dengan memenuhi kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1).
   e. Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dapat dilakukan di Kawasan Pabean di pelabuhan tujuan atau Kawasan Pabean lainnya.
   f. Dalam hal pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf e tidak dapat dilakukan di Kawasan Pabean pelabuhan tujuan atau Kawasan Pabean lainnya, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dapat dilakukan di tempat lain di dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

KOMODITI BESI BAJA, SERTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

- ✓ **Importasi Besi baja, baja Paduan, dan produk turunannya, serta tekstil dan produk tekstil yang tiba pada 10 maret – 17 Mei 2024, dikecualikan dari Persetujuan Impor (PI).**
- ✓ **Importasi Besi baja, baja Paduan, dan produk turunannya, serta tekstil dan produk tekstil yang tiba pada 10 maret – 17 Mei 2024, diwajibkan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor/Laporan Surveyor (LS) yang dapat dilakukan di Pelabuhan tujuan atau Kawasan pabean lainnya, dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1).**

KOMODITI SELAIN BESI BAJA, SERTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

- ✓ **Importasi komoditi selain Besi baja, baja Paduan, dan produk turunannya, serta tekstil dan produk tekstil yang tiba pada 10 maret – 17 Mei 2024, dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan dalam Permendag tentang kebijakan dan pengaturan impor.**
- ✓ **Dalam hal kebijakan dan pengaturan impor tersebut berupa Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor/Laporan Surveyor (LS), Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan di Pelabuhan tujuan atau Kawasan pabean lainnya, dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1).**

PENGATURAN PENGELUARAN BARANG IMPOR YANG TELAH TIBA DI PELABUHAN TUJUAN PERIODE 10 MARET – 17 MEI 2024

BC 1.1 sebelum 10 Maret 2024

VPTI dilakukan di Negara Asal, Negara Muat, PLB, KB/GB, KPBPB sesuai dengan kebijakan dan Pengaturan Impor di Permendag 20 tahun 2021 Jo. Permendag 25 tahun 2022

BC 1.1 sejak 10 Maret 2024 s.d 17 Mei 2024

VPTI di Kawasan Pabean Pelabuhan Tujuan atau Kawasan Pabean lainnya dapat dilakukan untuk :

- Komoditi di lampiran I dan II Permendag 8/2024 berupa Tekstil Produk Tekstil & Besi Baja,baja Paduan serta Produk Turunannya, tanpa perlu dipenuhi PI-nya
- Komoditi di lampiran I dan II Permendag 8/2024 yang berdasarkan Permendag 8/20224 lartasnya hanya LS saja. Contoh: Kosmetik, 136 HS elektronik, Obat Tradisional, 37 HS alas kaki, dan lain-lain.
- Komoditi di lampiran I dan II Permendag 8/2024 yang terkena lartas PI dan LS apabila sudah terpenuhi PI-nya
  Contoh: Pakaian jadi, ban, 3 HS elektronik, 6 HS alas kaki, dan lain-lain
- Komoditi di Lampiran I dan II Permendag 8/2024 yg terkena lartas IP, PI & LS, apabila sdh terpenuhi IP & PI-nya
  Contoh: Bahan Berbahaya (B2), Prekursor non farmasi, Nitrocelulose.
- Komoditi di Lampiran I dan II Permendag 8/2024 yang terkena lartas IT, PI & LS, apabila sdh terpenuhi IT & PI – nya
  Contoh: Bahan Berbahaya (B2), Prekursor non farmasi, Nitrocelulose.
- Komoditi di Lampiran I dan II Permendag 8/2024 yg terkena lartas IP & LS, apabila sudah terpenuhi IP-nya
  Contoh: Baterai lithium tidak baru.

Dalam hal pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis tidak dapat dilakukan di Kawasan Pabean pelabuhan tujuan atau Kawasan Pabean lainnya, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dapat dilakukan di tempat lain di dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

BC 1.1 setelah 17 Mei 2024

VPTI dilakukan di Negara Asal, Negara Muat, PLB, KB/GB, KPBPB sesuai dengan kebijakan dan Pengaturan Impor di Permendag 36 tahun 2024 Jo Permendag 08 tahun 2024

Untuk TPT dan Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya kembali dipersyaratan Persetujuan Impor

3.BARANG BAWAAN PRIBADI PENUMPANG DAN IMPOR BARANG KIRIMAN PRIBADI

PERMENDAG 8/2024

IMPOR BARANG BAWAAN PRIBADI PENUMPANG
Permendag 7/2024 & 8/2024

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

1

JENIS BARANG

Tidak ada pembatasan jenis barang, kecuali **barang dilarang impor dan barang berbahaya** (intan kasar, precursor non farmasi, nitrocellulose (NC), bahan peledak, bahan perusak lapisan ozon (BPO), barang berbasis sistem pendingin, bahan berbahaya, hydrofluorocarbon (HFC), baterai lithium tidak baru, dan limbah non B3)



2

JUMLAH BARANG

Tidak ada pembatasan jumlah barang, dalam setiap penumpang, kecuali untuk telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet dari luar Daerah Pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), paling banyak 2 (dua) unit per orang, untuk 1 (satu) kali kedatangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

PENGATURAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut

3

KONDISI BARANG

Barang dapat diimpor dalam **keadaan baru maupun tidak baru**

IMPOR BARANG KIRIMAN PRIBADI

1

JENIS BARANG

Tidak ada pembatasan jenis barang, kecuali **barang dilarang impor dan barang berbahaya** (intan kasar, precursor non farmasi, nitrocellulose (NC), bahan peledak, bahan perusak lapisan ozon (BPO), barang berbasis sistem pendingin, bahan berbahaya, hydrofluorocarbon (HFC), baterai lithium tidak baru, dan limbah non B3), dan kendaraan bermotor.

2

JUMLAH BARANG

Tidak ada pembatasan jumlah barang, dalam setiap pengiriman, kecuali untuk telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet dari luar Daerah Pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman.

3

KONDISI BARANG

Barang dapat diimpor dalam **keadaan baru maupun tidak baru**



PENGATURAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

!

- ✓ Pembatasan dari BPOM untuk obat dan makanan,
- ✓ pembatasan karantina terkait media pembawa penyakit, dan
- ✓ Pembatasan barang kena cukai

masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan

PEMBERLAKUAN

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

17 Mei 2024



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih

LAMPIRAN I PERMENDAG NO 8/2024
BARANG YANG DIBATASI IMPORNYA

LAMPIRAN I - KELOMPOK BARANG DAN LARTAS

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023 Jo. 3/2024 Jo. 7/2024 Jo. 8/2024								Persyaratan PI
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan		
					IT	IP	PI	LS	B	PB	
1		**HEWAN DAN PRODUK HEWAN**	**190**								
	A	Hewan	**14**	Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U)			V			V	**NK**
				Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U)			V			V	**NK**
				Day Old Chicken (API-P atau API-U)			V			V	**Pertek/Rekom/LHV dari Kementan**
				Day Old Chicken untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U)			V			V	**Pertek/Rekom/LHV dari Kementan**
				Hewan lainnya (API-P atau API-U)			V			V	**Pertek/Rekom/LHV dari Kementan**
				Hewan lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U)			V			V	**Pertek/Rekom/LHV dari Kementan**
	B	Produk Hewan dari Jenis Lembu	**10**	Produk Hewan dari Jenis Lembu (API-P atau API-U)			V			V	**NK**
				Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U)			V			V	**NK**
	C	Produk Hewan dari Jenis Selain Lembu	**76**	Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U)			V			V	**Pertek/Rekom/LHV dari Kementan**
	D	Produk Hewan Olahan	**90**	Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U)			V			V	**Pertek/Rekom/LHV dari Kementan**
2		**BERAS**	**13**	Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U)			V	V	V		**NK**
				Beras Keperluan Lain (API-P)			V	V	V		**NK**
				Beras Keperluan Lain (BUMN Pemilik API-U)			V	V	V		**NK**
3		**JAGUNG**	**2**	Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U)			V			V	**NK**
				Jagung Bahan Baku Industri (API-P)			V			V	**NK**

LAMPIRAN I - KELOMPOK BARANG DAN LARTAS

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023 Jo. 3/2024 Jo. 7/2024 Jo. 8/2024								
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI
					IT	IP	PI	LS	B	PB	
4		**MUTIARA**	**4**	Mutiara (API-P atau API-U)			**V**	**V**		**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari KKP**
5		**GULA**	**6**								
	A	Gula Kristal Mentah/ Gula Kasar	**3**	Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P)			**V**	**V**	**V**		**NK**
				Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P)			**V**	**V**	**V**		**NK**
				Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (AP-P)			**V**	**V**	**V**		**NK**
				Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat)			**V**	**V**	**V**		**NK**
	B	Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar	**1**	Gula Kristal Rafinasi (API-P)			**V**		**V**		**NK**
				Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat)			**V**		**V**		**NK**
	C	Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)	**2**	Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U)			**V**		**V**		**NK**
6		**PRODUK KEHUTANAN**	**441**	Produk Kehutanan (API-P)			**V**			**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
				Produk Kehutanan (API-U)			**V**			**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
7		**BAWANG PUTIH**	**1**	Bawang Putih (API-P atau API-U)			**V**	**V**		**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kementan atau Bapanas**
				Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U)			**V**	**V**		**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kementan atau Bapanas**
8		**PRODUK HORTIKULTURA**	**32**	Produk Hortikultura (API-P atau API-U)			**V**	**V**		**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
				Hortikultura Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U)			**V**	**V**		**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**

LAMPIRAN I - KELOMPOK BARANG DAN LARTAS

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023 Jo. 3/2024 Jo. 7/2024 Jo. 8/2024									
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI
					IT	IP	PI	LS	B	PB	
9		**CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA**	**72**	Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P)			**V**			**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari KKP**
				Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U)			**V**			**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari KKP**
				Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non - WOAH (API-P)			**V**			**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari KKP**
				Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non - WOAH (API-U)			**V**			**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari KKP**
10		**BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA**	**518**	Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) (503 HS)			**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) (503 HS)			**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) (15 HS)			**V**		**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) (15 HS)			**V**		**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
11		**BAN**	**33**	Ban (API-P)			**V**	**V**		**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				Ban (API-U)			**V**	**V**		**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
12		**MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA**	**14**	Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U)			**V**	**V**		**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Botasupal**
13		**BAHAN BAKU PLASTIK**	**1**	Bahan Baku Plastik (API-P)			**V**			**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
				Bahan Baku Plastik (API-U)			**V**			**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
14		**BAHAN BAKU PELUMAS**	**1**	Bahan Baku Pelumas (API-P)				**V**		**V**	

LAMPIRAN I - KELOMPOK BARANG DAN LARTAS

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023 Jo. 3/2024 Jo. 7/2024 Jo. 8/2024								
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI
					IT	IP	PI	LS	B	PB	
15		**PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI**	**6**	Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P)			**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
16		**SEMEN CLINKER DAN SEMEN**	**6**	Semen Clinker (API-P)			**V**	**V**		**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				Semen (API-U)			**V**	**V**		**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
17		**PUPUK BERSUBSIDI**	**7**	Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U)			**V**			**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kementan**
18		**KERAMIK**	**54**	Keramik (API-P atau API-U)				**V**		**V**	
19		**KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN**	**38**	Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman				**V**		**V**	
20		**GARAM**	**5**	Garam Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (API-P)			**V**	**V**	**V**		**NK**
				Garam Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri(API-U)			**V**	**V**	**V**		**NK**
21		**HASIL PERIKANAN**	**387**	Hasil Perikanan Bahan Baku/Penolong Industri (API-P)			**V**			**V**	**NK**
				Hasil Perikanan Selain Bahan Baku/Penolong Industri (API-U)			**V**			**V**	**NK**
22		**TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET**	**3**	Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U)	**V**		**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin dan Kominfo**
23		**SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL**	**6**	Sakarin dan Siklamat (API -P dan API-U) (3HS)			**V**	**V**		**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) (3 HS)			**V**	**V**		**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
24		**INTAN KASAR**	**3**	Intan Kasar (API-P atau API-U)			**V**			**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**

LAMPIRAN I - KELOMPOK BARANG DAN LARTAS

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023 Jo. 3/2024 Jo. 7/2024 Jo. 8/2024								
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI
					IT	IP	PI	LS	B	PB	
25		**MAKANAN DAN MINUMAN**	**232**	Makanan dan Minuman (API-P atau API-U)				V		V	
26		**OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**	**37**	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U atau API-P) (36 HS)				V	V		
				Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U atau API-P) (1 HS)				V		V	
27		**KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA**	**38**	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U dan API-P) (38 HS)				V	V		
28		**BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA**	**89**	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) (79 HS)							
				API-P hanya dapat mengimpor Pos Tarif/HS:- 6305.32.10, 6305.32.20, 6305.32.90, 6305.33.10, 6305.33.20, 6305.33.90, 6305.39.10, 6305.39.20, 6305.39.90, 6307.90.80; dan 6307.90.90			V	V	V		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) (8 HS)				V	V		
				Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) (2 HS)				V		V	
29		**MAINAN ANAK-ANAK**	**21**	Mainan (API-U atau API-P)				V	V		
30		**TAS**	**23**	Tas (API-U atau API-P)				V	V		

LAMPIRAN I - KELOMPOK BARANG DAN LARTAS

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023 Jo. 3/2024 Jo. 7/2024 Jo. 8/2024								
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI
					IT	IP	PI	LS	B	PB	
31		**PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI**	**325**	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) (322 HS)			**V**	**V**	**V**		**Non Pertek/Rekom/LHV**
				API-P hanya dapat mengimpor Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi dengan Pos Tarif/HS: - 6117.80.90; 6212.10.99; 6212.90.19; 6212.90.99; dan 6217.10.90							
				Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) (3 HS)				**V**		**V**	
32		**TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)**	**514**	TPT (API-P) (444 HS)			**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				TPT (API-U) (444 HS)			**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				TPT (API-P) (17 HS)			**V**		**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				TPT (API-U) (17 HS)			**V**		**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				TPT (API-P) (53 HS)				**V**	**V**		
				TPT (API-U) (53 HS)				**V**	**V**		
33		**TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK**	**79**	TPT Batik dan Motif Batik (API-P)			**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				TPT Batik dan Motif Batik (API-U)			**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
34		**MINUMAN BERALKOHOL**	**53**	Minuman Beralkohol Duty Paid (API-U)	**V**		**V**		**V**		**Non Pertek/Rekom/LHV**
				Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN Pemilik API-U)	**V**		**V**		**V**		**Non Pertek/Rekom/LHV**

LAMPIRAN I - KELOMPOK BARANG DAN LARTAS

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023 Jo. 3/2024 Jo. 7/2024 Jo. 8/2024								
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI
					IT	IP	PI	LS	B	PB	
35		**BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL**	**10**	Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P)			**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
36		**ALAS KAKI**	**43**	Alas Kaki (API-U) (6 HS)			**V**	**V**	**V**		**Non Pertek/Rekom/LHV**
				Alas Kaki (API-U atau API-P) (37 HS)				**V**	**V**		
37		**ELEKTRONIK**	**139**	Elektronik (API- U) (3 HS)			**V**	**V**	**V**		**Non Pertek/Rekom/LHV**
				Elektronik (API-P atau API- U) (136 HS)				**V**	**V**		
38		**SEPEDA RODA DUA SERTA SEPEDA RODA TIGA**	**4**	Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U)			**V**	**V**	**V**		**Non Pertek/Rekom/LHV**
39		**PLASTIK HILIR**	**140**	Plastik Hilir (API-P atau API -U)				**V**		**V**	
40		**PREKURSOR NON FARMASI**	**24**	Prekursor Non Farmasi (API-U)	**V**		**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin, BNN, Bareskrim**
				Prekursor Non Farmasi (API-P)		**V**	**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin, BNN, Bareskrim**
41		**MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN**	**37**								
	A	Minyak Bumi	**21**	Minyak Bumi (API-P atau API-U)			**V**		**V**		**NK**
	B	Gas Bumi	**7**	Gas Bumi (API-P atau API-U)			**V**		**V**		**NK**
	C	Bahan Bakar Lain	**9**	Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U)			**V**		**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari ESDM**

LAMPIRAN I - KELOMPOK BARANG DAN LARTAS

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023 Jo. 3/2024 Jo. 7/2024 Jo. 8/2024								Persyaratan PI
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				engawasa		
					IT	IP	PI	LS	B	PB	
42		**NITROCELLULOSE (NC)**	**4**	Nitrocellulose (API-U)	**V**		**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenhan, BAIS, Baintelkan Bareskrim**
				Nitrocellulose (API-P)		**V**	**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenhan, BAIS, Baintelkan Bareskrim**
43		**BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL**	**19**	Bahan Peledak (API-P)		**V**	**V**		**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenhan, BAIS, Baintelkan Bareskrim**
				Bahan Peledak (API-U)	**V**		**V**		**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenhan, BAIS, Baintelkan Bareskrim**
44		**BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)**	**9**	BPO Metil Bromida (API-P)			**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari KLHK**
				BPO Metil Bromida (API-U)			**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari KLHK**
				BPO Non Metil Bromida (API-P)			**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari KLHK**
				BPO Non Metil Bromida (API-U)			**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari KLHK**
45		**BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN**	**45**	Barang Berbasis Sistem Pendingan (API-P atau API-U)				**V**		**V**	

LAMPIRAN I - KELOMPOK BARANG DAN LARTAS

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023 Jo. 3/2024 Jo. 7/2024 Jo. 8/2024									
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				engawasa		Persyaratan PI
					IT	IP	PI	LS	B	PB	
46		**BAHAN BERBAHAYA (B2)**	**98**	Bahan Berbahaya (BUMN Pemilik API-U)	V		V	V	V		**Pertek/Rekom/LHV dari BPOM dan Kemenperin**
				Bahan Berbahaya (API-P)		V	V	V	V		**Pertek/Rekom/LHV dari BPOM dan Kemenperin**
47		**HYDROFLUOROCARBON (HFC)**	**20**	Hidrofluorocarbon (HFC) (API-P atau API-U)			V	V	V		**Pertek/Rekom/LHV dari KLHK**
48		**PRODUK KIMIA TERTENTU**	**3**	Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) (2 HS)			V	V		V	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) (1 HS)				V		V	
49		**KATUP**	**9**	Katup (API-P atau API-U)				V		V	

LAMPIRAN II PERMENDAG NO 8/2024
BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

LAMPIRAN II – BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023 Jo. 3/2024 Jo. 7/2024 Jo. 8/2024								Persyaratan PI
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				engawasa		
					IT	IP	PI	LS	B	PB	
		BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB)									
50		**BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG**	**339**								
	A	Kelompok A	**279**	BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 5 Tahun (API-P) (1 HS)			**V**	**V**		**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
				BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 10 Tahun (API-P) (5 HS)			**V**	**V**		**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
				BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 15 Tahun (API-P) (1 HS)			**V**	**V**		**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
				BMTB Kelompok A Usia Paling lama 20 Tahun (API-P) (257 HS)			**V**	**V**		**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
				BMTB Kelompok A Usia Paling lama 20 Tahun - Pertambangan (API-P) (15 HS)			**V**	**V**		**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
	B	Kelompok B	**29**	BMTB Kelompok B Usia Paling lama 20 Tahun (API-P) (4 HS)			**V**			**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenhub**
				BMTB Kelompok B Usia Paling lama 25 Tahun (API-P) (4 HS)			**V**			**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenhub**
				BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) (21 HS)			**V**			**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenhub**
	C	Kelompok C	**31**	BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 15 Tahun (API-P) (4 HS)			**V**			**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenhub**
				BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 20 Tahun (API-P) (14 HS)			**V**			**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenhub**
				BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 25 Tahun (API-P) (13 HS)			**V**			**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenhub**

LAMPIRAN II – BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023 Jo. 3/2024 Jo. 7/2024 Jo. 8/2024								
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				engawasa		Persyaratan PI
					IT	IP	PI	LS	B	PB	
		BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REKONDISI	**210**								
	A	Kelompok A	**208**	BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 5 Tahun (API-P)			**V**	**V**		**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
				BMTB Kelompok A Usia Paling lama 20 Tahun (API-P)			**V**	**V**		**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
	B	Kelompok B	**2**	BMTB Kelompok B Usia Paling lama 20 Tahun(API-P)			**V**	**V**		**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
		BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REMANUFAKTURING	**23**	BMTB Usia Paling Lama 20 Tahun (API-P)			**V**	**V**		**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
		BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU UNTUK TUJUAN TERTENTU		Relokasi Industri (Bedol Pabrik) (API-P)			**V**	**V**		**V**	**Non Pertek/Rekom/LHV**
				Dispensasi BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 20 Tahun Untuk Perusahaan Pemakai Langsung (API-P)			**V**	**V**		**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin**
				Dispensasi BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 20 Tahun Untuk Perusahaan Pemakai Langsung (API-P)			**V**			**V**	**Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin dan Kemenhub**
51		**BATERAI LITHIUM TIDAK BARU**	**13**	Baterai Lithium Tidak Baru (API-P)		**V**		**V**	**V**		**Non Pertek/Rekom/LHV**
52		**LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI**	**66**	Limbah Non B3 (API-P)			**V**	**V**	**V**		**Pertek/Rekom/LHV dari KLHK dan Kemenperin**